

**PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM
ARENA POLITIK (STUDI PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN
MIMIKA, PROPINSI PAPUA DALAM
PRESPEKTIF PIERRE BOURDIEU)**

Jurnal Analisa Sosiologi

Oktober 2020, 9(2): 436-451

Sopia Wadanubun¹, Antik Tri Susanti², Elly E. Kudubun³

Abstract

Women are constructed as second-class creatures. This prejudice then gets reinforced in the moral structure of society manifested in religious and customary regulations. However, in the political arena an affirmative policy has been set up by giving a 30% quota of permanent. This study wants to find out how women struggle in the political arena, using the perspective of Pierre Bourdieu. The approach used in this study is a qualitative research approach, which is a research procedure that produces descriptive data using interview, observation, and document utilization techniques. This study concludes that gender is not a matter of unsuccessful person in the election stage. This means that men and women have the same opportunity to be chosen. Election is determined by the amount of economic capital. Because economic capital is the dominant determinant of victory, not because of the issue of women's struggle, in practice it can be predicted that the struggle against women's rights will not have a place in the political arena in Mimika Regency, Papua Province.

Keywords: *Women, Politics, Arena, Pierre Bourdieu, Capital*

Abstrak

Perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk kelas dua, prasangka ini kemudian mendapatkan penguatan dalam struktur moral masyarakat yang terwujud dalam peraturan-peraturan agama maupun adat, namun demikian dalam arena politik telah ditetapkan kebijakan affirmative dengan memberi perempuan kuota 30%. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perjuangan perempuan dalam arena politik, dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gender bukan merupakan persoalan ketidakberhasilan seseorang dalam tahap pemilihan, artinya laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Tentunnya keterpilihan seseorang ditentukan oleh jumlah modal ekonomi.

Kata kunci : *Perempuan, Politik, Pierre Bourdieu, Modal*
PENDAHULUAN

^{1,2,3} Department Of Sociology, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

¹ sopia.wadanubun_fiskom@uksw.edu

Perempuan berderajat lebih rendah dari pada laki-laki. Inilah anggapan umum yang berlaku saat ini tentang kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat. Anggapan ini tercermin dalam prasangka-prasangka umum, seperti seorang istri harus melayani suami dan lebih ditempatkan dalam sektor privat atau domestik. Prasangka ini kemudian mendapatkan penguatan dalam struktur moral masyarakat yang terwujud dalam peraturan-peraturan agama maupun adat. Berbeda dengan perempuan, laki laki ditempatkan sebagai kepala keluarga, pencari nafkah dan berhak dalam mengambil keputusan. (Lestari, 2017).

Untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan tersebut maka perlu diberlakukan kesetaraan gender. Tujuannya agar laki - laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak - haknya yang sama sebagai manusia dalam semua bidang, termasuk dalam kegiatan politik.

Di Indonesia perempuan sudah bisa mendapatkan akses dalam posisi politik. Berkat perjuangan para aktivis permasalahan perempuan dan koalisi perempuan anggota parlemen, implementasi tindakan *affirmatif* dalam hal perwakilan perempuan di parlemen dan partai politik telah berhasil diundangkan secara formal dalam pasal 65 undang-undang pemilu No. 12 tahun 2003 (Pratiwi, 2019). Aturan tersebut mengatur keterlibatan perempuan dalam partai politik dengan kuota minimal sebesar 30%. Itu artinya negara telah memberikan ruang kepada perempuan agar dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam bidang politik.

Khususnya untuk Propinsi Papua, tertuang dalam pasal 1 ayat 5 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua. Peraturan tersebut memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan pasal 246 ayat 2 setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Dialektika struktur patriarki dengan kesempatan kebijakan *affirmatif* menjadi tantangan bagi perempuan dalam memasuki arena politik. Memberi kesempatan bagi perempuan, namun belum tentu serta merta mengeliminir budaya patriarki yang sudah terlanjur disepakati secara sosial. Pierre

Bourdieu menjelaskan bahwa dalam dunia objektif sekalipun nampaknya tidak ada peluang, selalu masih ada kemungkinan, yang disebutnya sebagai probabilitas objektif (Bourdieu, 1998). Hal itu tidak sama dengan pendapat Emile Durkheim yang melihat struktur memiliki kuasa mutlak memaksa individu (Johnson, 1994). Digerakkan oleh keinginan untuk mengatasi apa yang disebutkan sebagai oposisi palsu antara objektivisme dengan subjektivisme, atau hal yang disebutnya sebagai, “oposisi absurd antara individu dengan masyarakat”, Pierre Berdieu mengembangkan konsep arena untuk menolak relasi sederhana antara individu dan masyarakat, (Bourdieu, 1997).

Dalam arena, ada posisi-posisi agen sosial (manusia atau institusi), ada keterbatasan terhadap apa yang boleh/tidak, ada doksa (aturan-aturan yang tidak dipertanyakan lagi karena dianggap wajar). Namun juga dalam arena, agen-agen sosial menggunakan ragam strategi guna memertahankan atau mengimprovisasi posisi mereka yang terhubung dengan habitus dan modal (Rianawati, 2017). Perempuan sebagai agen sosial, dalam doksa budaya patriarki dalam politik, dengan demikian masih memiliki peluang mengimprovisasi posisi dengan strategi menggunakan modal-modal yang dimiliki. Dalam terminologi Bourdieu modal tidak hanya dipahami sebagai modal ekonomi. Terdapat modal-modal lain, yakni modal budaya, modal sosial dan modal simbolik.

Tulisan ini ingin mengetahui bagaimana perjuangan perempuan dalam arena politik. Bisakah perempuan memenangkan arena dengan strategi menggunakan kapasitasnya (modal) yang dia miliki? Bagaimana perempuan berjuang melawan hegemoni budaya patriarki dalam arena politik? Jawaban pertanyaan tersebut akan ditelusuri dengan menggunakan informan perempuan yang terpilih maupun yang tidak terpilih menjadi DPRD di Kabupaten Mimika. Mengapa bisa terpilih atau tidak terpilih? Apakah terpilihnya perempuan karena berlangsungnya subordinasi perempuan? Penelitian ini ingin menjawab, dalam arena politik, apakah perempuan diterima kehadirannya karena modal yang dimiliki atau sebagai objek dari berlangsungnya superioritas laki-laki.

Beberapa studi serupa telah dilakukan, diantaranya yaitu : Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender Oleh Very Wahyudi tahun 2018

. Jurnal tersebut menjelaskan tentang persoalan yang melatarbelakangi ketidakberhasilan perempuan dalam dunia politik. adalah faktor kultur dan pemahaman tentang agama. Selain itu, Zaenal Mukarom dalam Perempuan dan Politik tahun 2008 Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Jurnal tersebut menjelaskan tentang faktor yang menghambat keterwakilan perempuan dalam dunia politik di pengaruhi oleh budaya bangsa, yang lambat laun membentuk budaya politik yang kemudian menjadi cara pandang masyarakat dan persepsi masyarakat mengenai politik.

Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini melihat dunia objektif (kultur) bukan menjadi “harga mati”, masih terdapat peluang perempuan untuk berjuang dalam arena politik dengan menggunakan modal yang dimiliki. Dengan demikian ada hal yang sama, namun ada yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Kesamaannya adalah dunia objektif patriarkhi bagaimanapun mempengaruhi terpilihnya perempuan sebagai anggota dewan, namun lebih dari itu, dalam perspektif Pierre Bourdieu, terdapat modal sosial, modal ekonomi, modal budaya yang dimiliki untuk memenangkan arena. Kepandaian perempuan dalam membuat strategi memainkan modal-modal inilah yang akan membantu perempuan keluar dari belenggu budaya patriarkhi.

Dari latar belakang diatas, penelitian ini ingin memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian : apakah perempuan terpilih sebagai anggota dewan dalam arena politik karena modal yang dimiliki atau sebagai objek dari berlangsungnya superioritas laki-laki ? Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perjuangan perempuan dalam arena politik.

Menurut Bourdieu praktik (secara sosial) merupakan hubungan relasional yakni struktur objektif dan representasi subyektif agen dan pelaku, terjalin secara dialektik. Fenomena sosial apapun merupakan produk dari tindakan-tindakan individual. Oleh karena itu logika tindakan harus dilihat (dicari) pada sisi rasionalitas pelakunya (Haryatmoko, 2003).

Praktik sosial oleh Bourdieu merupakan segala sesuatu yang di amati dan dialami yang ada di luar diri pelaku sosial (interior) bergerak dinamis secara dialektis dengan pengungkapan dari segala sesuatu yang

telah di internalisasi menjadi bagian dari diri pelaku sosial (interior). untuk menjelaskan sebuah praktik, Bourdieu kemudian mengajukan konsep khususnya yaitu : $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$.

Dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh perempuan dalam kontestasi pilihan DPRD kabupaten Timika merupakan hasil dari bagaimana dia menggunakan modal dalam konteks habitus, dan memainkannya dalam arena politik. Terpilihnya perempuan karena kemampuannya memanfaatkan modal yang dimiliki, tidak semata-mata ditentukan oleh budaya patriarki, dunia objektifnya.

Menurut Bourdieu habitus merupakan suatu sistem melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal, disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generative bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif (Bourdieu, 1977).

Habitus merupakan pembiasaan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan rasa permainan (*feel for the game*) yang melahirkan berbagai macam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Habitus adalah hasil internalisasi struktur dalam dunia sosial, atau struktur sosial yang di batinkan. Selain itu habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu, habitus bukan bawaan alamiah atau kodrat tetapi merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan dan bersosialisasi dalam masyarakat. Proses pembelajaran sangat halus, tak disadari dan tampil sebagai hal yang wajar, (Fauzi, 2014).

Konsep habitus tidak dapat dipisahkan dari arena karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Habitus mendasari terbentuknya arena, sementara dilain pihak arena menjadi lokus dari kinerja habitus. Bourdieu melihat arena menurut definisinya sebagai arena pertempuran, arena juga merupakan arena perjuangan. Arena adalah jenis pasar kompetitif yang didalamnya terdapat berbagai jenis modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik (Bourdieu, 2010). Oleh karena itu untuk memenangkan sebuah kontestasi dalam arena pertarungan, maka permainan strategi yang digunakan adalah (1) strategi reproduksi (*reproduction strategies*) menunjuk pada kumpulan praktik yang

di rancang untuk mempertahankan atau meningkatkan aset-aset para pelaku dengan kecenderungan ke masa depan. Strategi ini bergantung pada jumlah dan komposisi modal, (2) strategi penukaran kembali (*reconversions strategies*) berkaitan dengan pergerakan-pergerakan di dalam ruang sosial yang terstruktur dalam dua dimensi yaitu keseluruhan jumlah modal yang terstruktur dan pembentukan jenis modal yang didominasi dan terdominasi. (Fauzi, 2014).

Dalam pemikiran Bourdieu, modal bukan berarti tentang uang saja seperti dalam istilah ekonomi, namun lebih luas dari hal tersebut. modal berarti sebuah hasil kerja yang terakumulasi dalam diri seseorang, Modal oleh Bourdieu adalah hal yang tidak hanya bersifat materi namun juga bersifat non materi. Hal tersebut sangat penting karena akan menentukan posisi seseorang atau kelompok dalam struktur sosial, (Martono, 2018).

Ada empat modal yaitu ; modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Modal ekonomi adalah modal yang berkaitan dengan uang dan warisan yang bisa diwariskan untuk generasi selanjutnya. Modal sosial adalah modal bersama yang membuat adanya jaringan hubungan misalnya seperti keluarga, suku, sekolah. Selanjutnya modal budaya adalah kemampuan seseorang dalam sikap, cara bertutur kata, berpenampilan, cara bergaul dan sebagainya. Sedangkan modal simbolik adalah sesuatu yang dikenali dan diakui secara natural, seperti status atau gelar pendidikan seseorang (Martono, 2018).

Pierre Bourdieu menyatakan bahwa untuk mempertahankan dominasi, aktor menggunakan strategi. Bourdieu menyebut “strategi adalah produk dari rasa praktis seperti halnya permainan buat suatu permainan yang partikular dan historis”. Strategi terkait dengan praktik seorang agen dalam ruang sosial dan arena tertentu, berdasarkan modal-modal yang dimiliki agen. Pierre Bourdieu menyatakan untuk mempertahankan dominasi, aktor menggunakan strategi (Bourdieu, 1998).

Pierre Bourdieu dalam penelitiannya pada suku Kabyle menjelaskan bahkan dalam praktik yang sakralpun, terjadi sebuah siasat atau strategi yang dilakukan oleh agen yang mempunyai kepentingan terhadap suatu peristiwa sakral. Permainan perkawinan mirip dengan permainan kartu. Hasilnya sebagian bergantung kepada perjanjian, pada kartu yang dipegang

yang nilainya dibatasi oleh aturan permainan, sesuai dengan karakteristik masyarakat yang bersangkutan, dan sebagian lagi tergantung pada ketrampilan si pemain. (Rianawati, 2017). Dalam penelitian ini, perlu strategi untuk memainkan modal yang dimiliki, agar perempuan terpilih sebagai anggota dewan dalam arena politik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Jenis penelitian berupa studi kasus, yakni meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu, (Bogdan, 1992). Dalam penelitian ini dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Mimika.

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Mei 2019 hingga Juli 2019. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Penulis pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika sehingga penulis sudah mengetahui kondisi pembangunan serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika.

Sumber data primer dalam penelitian ini berdasarkan data yang di dapat melalui wawancara dengan informan yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio dan pengambilan foto. Informan adalah calon legislatif yang terpilih maupun tidak terpilih, tokoh masyarakat, maupun masyarakat biasa. Adapun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari berbagai buku yang sifatnya sebagai penunjang penelitian berupa kepustakaan dan data yang didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Surat Keputusan Gubernur Papua tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dan data Daftar Calon Tetap yang terdaftar dalam partai politik, maupun dokumen penunjang lainnya.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data berupa observasi yang sudah penulis lakukan saat praktek kerja lapangan di Kabupaten Mimika selama 62 hari berada di Kabupaten Mimika. Penulis dapat mengetahui karakteristik masyarakat dan kondisi pembangunan di Kabupaten Mimika. Pada penelitian ini penulis memperoleh data dari 6 responden yang telah di pilih untuk memberikan informasi yang di anggap valid dan akurat yang dapat di percaya, pengumpulan data yang selanjutnya penulis lakukan dengan pendokumentasian berupa foto untuk mengetahui kondisi pembangunan di Kabupaten Mimika.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini melalui proses pemilihan atau seleksi, pemfokusan atau pemusatan data, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang penulis dapatkan dari data lapangan, sehingga dari sekumpulan informasi yang penulis dapatkan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap akhir dari proses pengumpulan data dapat di maknai sebagai penarikan arti data yang telah di tampilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konstruksi Sosial Perempuan Papua dan Habitus Dalam Arena Politik

Memahami perempuan Papua dan representasinya dalam kebudayaan Papua di pandang sangat kuat membelenggu masyarakat Papua pada umumnya. Khususnya dalam hal hubungan gender. Menurut Petrus Takege, kaum perempuan sepenuhnya di kuasai oleh laki-laki, perempuan di pandang sebagai benda milik laki-laki belaka, (Takage, 2007). Dalam kehidupan sehari-hari, beban kerja perempuan di gambarkan sangat berat misalnya di kalangan masyarakat pantai, selain melahirkan dan menyusui anak, perempuan harus menokok sagu dan mencari ikan. Namun sejak hadirnya *missie* dan *zending* di Papua, terutama karena pengaruh ajaran tentang sepuluh perintah Allah, melalui gereja terjadilah perubahan pandangan bahwa perempuan tidak lagi diisolasi oleh adat dan di kembangkan pengakuan bahwa perempuan memiliki derajat yang sama (Takage 2007).

Dalam upaya untuk memberdayakan perempuan papua, sejak masa Belanda hingga hari ini pemberdayaan telah dilakukan dengan adanya pendidikan formal dan informal. Dimulai ketika Belanda membuka kesempatan bersekolah untuk anak-anak papua, termasuk perempuan pada tahun 1940-an, di beberapa pusat pendidikan. Salah satunya yang menonjol adalah *Zending Zchoolen* yang menjadi Yayasan Pendidikan Kristen (YPK). Pada 2 april 1962 Gereja Kristen Injili (GKI) di Irian Barat mendirikan pusat pendidikan sosial (PPS). PPS menyediakan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan perempuan dikampung-kampung.

Bergulirnya reformasi, gerakan perempuan papua juga berkembang pesat dan bernuansa politis. Pada 16 januari 1999 didirikan Aliansi Perempuan Papua (APP) yang berusaha agar perempuan dilibatkan dalam musyawarah besar masyarakat adat papua pada tahun 2000. Berkat usaha ini, perempuan mendapat tempat di dalam Presidium Dewan Papua (PDP) yang berdiri pada tahun 2000 dengan sebutan'' Pilar Perempuan''

Setelah reformasi 1998 wadah baru perempuan bermunculan, beberapa di antaranya adalah Yahamak di Timika, Hunni Inane di Wamena, Solidaritas Perempuan Papua Cinta Keadilan dan Kedamaian (SP2CK2) di Biak, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3AP) dan lembaga-lembaga lainnya yang menunjukkan bahwa di kalangan perempuan telah tumbuh semacam kepercayaan diri dan kesadaran untuk pelembagaan gerakan mereka. Banyak dari gerakan mereka yang cukup aktif memberikan kontribusi signifikan pada gerakan sosial papua secara umum.

Didalam struktur kekuasaan politik, seiring kebijakan *affirmatif* untuk melibatkan minimal 30% caleg perempuan agar berkontestasi dalam pemilihan legislatif, pada pemilihan legislatif di Kabupaten Mimika sejak tahun 2004 - 2019 keterlibatan perempuan dalam dunia politik meningkat secara signifikan. Hal ini dapat di buktikan lewat jumlah presentase keterlibatan perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada periode tahun 2009 -2014. Jumlah perempuan yang terlibat dalam parpol sebanyak 133 orang dan pada periode tahun 2019-2024, jumlah perempuan yang terlibat pada parpol sebesar 143 orang (DCT Kabupaten Mimika Tahun, 2009-2019). Oleh karena itu perempuan papua khususnya di Kabupaten

Mimika terus melakukan ekspansi dalam dunia politik agar mampu menunjukkan eksistensinya, (Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 182 tahun 2004, tentang peresmian kenggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode tahun 2004-2019).

Permainan modal - modal sebagai bentuk strategi sudah bertahan sejak lama dalam kontestasi politik di Kabupaten Mimika, namun di antara semua jenis modal-modal yang tersedia, modal ekonomi merupakan kunci utama dalam transaksi politik untuk dapat terpilih sebagai seorang anggota dewan. Hal itu seperti yang di sampaikan oleh MB selaku masyarakat Kabupaten Mimika. Hasil wawancara dengan MB, mengungkapkan bahwa “pada saat kampanye politik para caleg biasanya sudah memberikan janji untuk mewujudkan kebutuhan rakyat melalui pengadaan bangunan fisik sesuai kebutuhan masyarakat dan ketika menjelang H-3 pemilihan legislatif akan ada transaksi ekonomi seperti pemberiang uang dengan jumlah RP. 500.000 untuk satu orang (satu suara). Besarnya jumlah pemberian uang dapat menentukan pilihan politik masyarakat, sehingga jika ada caleg yang memberikan sokongan uang dengan jumlah yang lebih besar maka masyarakat akan memberikan pilihan politik pada caleg tersebut. Transaksi ekonomi dalam pemilihan legislative di Kabupaten Mimika bukan menjadi hal yang baru bagi masyarakat, namun trasaksi politik uang sudah berlangsung sejak lama di Kabupaten Mimika sehingga masyarakat telah terbiasa dengan penerapan politik uang dalam pesta demokrasi di Kabupaten Mimika.

Habitus politik meskipun perlahan menerima kehadiran perempuan, namun transaksi politik lebih ditentukan oleh modal ekonomi. Uang menjadi penentu terpilih tidaknya menjadi anggota dewan, tanpa memandang gender.

Pembahasan

Modal, Strategi Dan Arena Pertarungan Politik

Pada pemilihan legislatif di Kabupaten Mimika, ketika seseorang berkomitmen untuk terlibat dalam kontestasi politik maka orang tersebut telah mengumpulkan modal-modal yang dimiliki sebagai suatu kekuatan untuk mengatur strategi agar dapat memenangkan dirinya dalam arena

pertarungan politik. Biasanya modal-modal tersebut dimainkan ketika sebelum masa kampanye maupun pada saat kampanye politik berlangsung. Pada saat sebelum masa kampanye atau calon legislatif (caleg) tersebut telah dinyatakan terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka seorang caleg menggunakan modal sosial yaitu dengan melakukan pendekatan dengan kerabat atau masyarakat yang sudah mempunyai hubungan khusus dengan dirinya. Selain itu keterlibatan seorang caleg dalam berbagai organisasi-organisasi lokal juga membantunya untuk memobilisasi masa, agar kelak masyarakat dapat memberikan pilihan politik pada dirinya atas dasar ketokohnya dalam lembaga organisasi.

Selain modal sosial, ketersediaan finansial yang mempermudah seorang caleg dalam kampanye politik. Modal ekonomi digunakan sebagai kebutuhan kampanye untuk membiayai transportasi, kebutuhan mencetak poster atau baliho serta kebutuhan untuk menggaji tim sukses. Ketersediaan dari modal-modal tersebut merupakan faktor penunjang dalam kampanye politik, seperti yang diungkapkan oleh YT selaku politikus perempuan yang terpilih dalam kontestasi pemilihan legislatif di Kabupaten Mimika pada periode tahun 2019-2024. Dalam keterangannya YT mengungkapkan bahwa :

“dalam dunia politik, uang merupakan basis material penting dalam menunjang kebutuhan partai. Jika seorang caleg yang terlibat dalam politik tidak menggunakan uang sebagai faktor penunjang maka hal itu dapat dikatakan mustahil. Menurutnya dalam dunia politik dibutuhkan *cross politik* untuk kebutuhan kampanye, fungsi dari *cross politik* adalah untuk membiayai kebutuhan tim sukses, apalagi bagi tim yang mempunyai daerah pilihan di medan yang sangat sulit, mereka pasti membutuhkan biaya yang besar untuk menunjang kebutuhan kampanye, Maka tidak benar jika ada caleg yang masuk dalam dunia politik bila tanpa uang”.

Pentingnya uang juga ditegaskan oleh RH, selaku caleg perempuan yang gagal, dalam keterangannya RH menjelaskan :

”kendala utama yang saya hadapi saat terlibat dalam kontestasi politik adalah minimnya uang yang saya miliki, karena saya dari masyarakat yang kurang mampu secara finansial, sehingga pada masa kampanye politik, saya tidak memakai jasa tim sukses. Niat saya untuk terlibat dalam

kontestasi politik agar dapat mensosialisasikan visi-misi saya, bicara dari rumah ke rumah, sehingga saya dapat mendengarkan keluh kesah dari setiap masyarakat”.

Dalam kontestasi politik, transaksi politik bukan uang tidak hanya dilakukan oleh caleg perempuan, namun juga dilakukan oleh caleg laki-laki seperti yang disampaikan oleh KR selaku caleg laki-laki yang tidak terpilih periode tahun 2019-2024. Dalam wawancara KR menjelaskan bahwa secara ketokohan figurnya sudah di kenal oleh masyarakat karena dirinya telah menjabat sebagai dewan suku dalam beberapa periode, namun ketika terlibat dalam kontestasi politik, modal ekonomi yang dimainkan adalah sebesar seratus juta. Dana sebesar seratus juta di pakai untuk kebutuhan kampanye, namun menurutnya investasi dana dengan jumlah seratus juta rupiah tidak cukup dalam transaksi politik karena banyak caleg yang terlibat dalam kontestasi politik memainkan strategi dengan modal ekonomi yang lebih besar dan modal tersebut di pakai untuk kebutuhan kampanye serta membeli suara masyarakat.

Permainan modal ekonomi sebagai strategi dalam arena pertarungan politik kini menjadi sebuah tradisi yang terus berkembang dalam kontestasi politik di Kabupaten Mimika. Pilihan politik seseorang, dapat ditentukan lewat besarnya modal ekonomi yang diberikan oleh seseorang yang terlibat dalam kontestasi politik, seperti yang disampaikan oleh MB selaku masyarakat Kabupaten Mimika. dalam wawancaranya MB mengungkapkan bahwa pada saat kampanye politik para caleg biasanya sudah memberikan janji untuk mewujudkan kebutuhan rakyat melalui pengadaan bangunan fisik sesuai kebutuhan masyarakat dan ketika menjelang H-3 pemilihan legislatif akan ada transaksi ekonomi seperti pemberian uang dengan jumlah Rp.500.000 untuk satu orang (satu suara), besarnya jumlah pemberian uang dapat menentukan pilihan politik masyarakat, sehingga jika ada caleg yang memberikan sokongan uang dengan jumlah yang lebih besar maka akan memberikan pilihan pada caleg tersebut. Pembagian uang sudah merupakan sebuah budaya politik yang telah berlangsung di Kabupaten Mimika. Sehingga jika ada caleg yang terlibat dalam kontestasi politik tanpa mempunyai modal uang yang cukup besar maka secara otomatis akan kalah dalam kontestasi politik.

Selain modal social, modal ekonomi, juga terdapat modal budaya yang terus berkembang dalam ajang kontestasi politik di Kabupaten Mimika, politik dinasti terus di pelihara secara subur dalam pesta demokrasi. Hal ini terbukti pada salah satu kepala daerah di Kabupaten Mimika. Selama masa jabatannya sebagai Kepala Daerah, anaknya juga terlibat sebagai anggota legislative selama dua periode. Hal ini bukan hanya di pengaruhi oleh kemampuan intelektual anaknya, namun karena figur ayahnya sebagai orang nomor satu di Kabupaten tersebut sehingga dapat mempermudah anaknya untuk terus mempertahankan eksistensinya dalam dunia politik.

Ketika berbicara modal yang digunakan oleh agen-agen sebagai instrument atau strategi dalam arena pertarungan politik, penulis ingin mengaitkan dengan pemikiran Karl Marx tentang modal. Dalam tradisi Marxian bentuk-bentuk modal didefinisikan dengan merujuk pada penguasaan ekonomi, modal ekonomi merujuk pada alat-alat produksi seperti (mesin, tanah, tenaga kerja), materi (pendapatan, benda-benda), dan uang. Menurut Marx modal ekonomi merupakan modal yang secara langsung bisa ditukar, dipatenkan sebagai hak milik individu, modal ekonomi merupakan jenis modal yang relatif paling independen dan fleksibel karena modal ekonomi secara mudah bisa digunakan atau ditransformasikan ke dalam ranah-ranah lain serta fleksibel untuk diberikan atau di wariskan kepada orang lain. Demikian pula dalam penelitian ini, modal ekonomi sangat fleksibel membeli modal lainnya, bahkan bisa dikatakan modal ekonomi yang paling menentukan kemenangan pemilihan menjadi anggota legislatif. Dengan kata lain, khususnya dalam tahapan pemilihan, tidak terjadi bias gender. Perempuan akan memperoleh dukungan pemilih asal memiliki modal ekonomi yang kuat. Dalam istilah setempat, uang merupakan *cross politik*, karena dalam prosesnya modal sosial berupa jaringan, modal budaya, akan bisa “terbeli” oleh modal ekonomi.

KESIMPULAN

Kebijakan *affirmatif* melalui sistem kuota 30% berhasil memberi peluang perempuan untuk masuk dan terlibat dalam dunia politik. Sejauh ini partai politik merupakan pintu masuk bagi perempuan agar dapat meraih jabatan politik di parlemen. Seperti yang terjadi dalam kontestasi politik di Kabupaten Mimika, sepanjang tahun 2004 hingga 2019 keterlibatan perempuan dalam dunia politik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah presentase keterlibatan perempuan dalam daftar calon tetap (DCT).

Pada tahapan pemilihan, keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik di Kabupaten Mimika menggunakan berbagai strategi dengan modal yang dimiliki, baik modal sosial, modal budaya, modal simbolik, maupun modal ekonomi. Dalam habitus yang semakin membuka ruang perempuan berpolitik, serta maraknya politik uang, maka modal ekonomi menjadi determinan dan menjadi *cross politik*. Istilah *cross politik*, merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa uang menjadi penentu utama kemenangan dalam arena politik. Dapat disimpulkan, dalam pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Mimika tidak terjadi bias gender. Laki-laki atau perempuan mempunyai peluang yang sama, karena yang paling menentukan adalah seberapa banyak memiliki modal ekonomi.

Pierre Bordieu menyatakan bahwa praktik merupakan hasil dari habitus, modal dalam arena. Menurut teori ini, karena dalam habitus serta modal yang dimiliki dari hasil penelitian ini tidak ada relevansinya dengan suara perempuan, maka bisa diprediksi bahwa perjuangan perempuan dalam praktiknya akan masih jauh dari ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhasin, K, 1996. *Menggugat Patriarki : Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Bourdieu, Pierre, 1977. *Outline of Theory of Practise*, London, Cambridge University Press.
- Bogdan and S.K. Blikien, 1992. *Qualitative Reseach For Education, An Introduction To Theory And Methods*. Boston : Allyn and Bacon.Inc.

- Bourdieu, Pierre, 2010. *Arena Produksi Kultur*. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Kreasi wacana
- Bourdieu, Pierre, 1998. *Practical Reason: On The Theory of Action*. California: Stanford University Press.
- Bourdieu, Pierre, 1997. *Outline of a Theory of Practice*, transl. by Richard Nice, Great Britain: Cambridge University, 1997.
- Durkheim, Emile, (1893). *Division Of Labour in Society*. (Reprinted in 1997). NY: Free Press.
- Fauzi, Fashri, 2014. Pierre Bourdieu : *Menyikap Kuasa Simbol*. Yogyakarta : Jalasutra
- Haryatmoko, 2003. Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu: Menyikap Kepalsuan Budaya Penguasa, dalam *Basis* No.11-12, Tahun ke-52, November 2003.
- Harker, R., 2009. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta : Jalasutra
- Johnson, Doyle Paul, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Lestari, Fitri, 2017. *Sejarah Penindasan Dan Gerakan Perempuan Dalam Perjuangan Kelas*. Jakarta : Siempre.
- Martono, Nanang, 2018. *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratiwi, Andi Misbahul, 2019. Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik : Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019 dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, 151-163, halaman 151 – 162.
- Rianawati, Selly, 2017. *Teori Tentang Praktik : Saduran Outline of Theory of Practice Karya Pierre Bourdieu*. Bandung : Ultim.
- Takage, Petrus, 2007. *Perempuan Papua*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 182 tahun 2004, *tentang peresmian kenggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode tahun 2004-2009*”

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 160 tahun 2009, *tentang peresmiaan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika periode tahun 2009-2014*”

Surat Keputusan Gubernur Papua nomor 155.2/192/tahun 2017 *tentang pengesahan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019*”